

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini tengah melakukan pembangunan dalam berbagai aspek baik ekonomi, sosial, budaya, politik, dan aspek lainnya. Pembangunan pada hakikatnya tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan adanya perubahan nilai dan *mindset* masyarakat menuju ke arah yang lebih baik.

Pembangunan dalam jangka panjang diharapkan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik, bahkan mampu mengentaskan kemiskinan sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa dibutuhkan penanggulangan kemiskinan berupa perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki berbagai macam permasalahan, salah satunya adalah permasalahan kemiskinan. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin dengan pengeluaran per kapita per bulan di angka bawah garis kemiskinan sebesar 25,90 juta penduduk. Tingginya angka kemiskinan menggambarkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pengentasan kemiskinan masih belum berhasil. Menurut Huraerah (2006:2) kebijakan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan mengalami beberapa kekeliruan. Pertama, pemerintah masih beorientasi pada aspek ekonomi dibandingkan

aspek multidimensional dimana penanggulangan kemiskinan yang masih berfokus pada ekonomi terbukti mengalami kegagalan. Kedua, pemerintah lebih bernuansa kemurahan hati dibandingkan mengarahkan masyarakat menjadi lebih produktif. Ketiga, lebih memposisikan masyarakat miskin sebagai objek. Terakhir, pemerintah masih menempatkan dirinya sebagai penguasa dibanding memposisikan dirinya sebagai fasilitator. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menciptakan pembangunan yang berkeadilan dengan memperhatikan seluruh kelompok masyarakat, termasuk dalam kondisi rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin.

Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan kemiskinan, hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Peraturan ini menjelaskan bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam melakukan suatu upaya dengan membentuk kebijakan atau program yang dapat membantu warga negara dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sandang, perumahan, pekerjaan, dan pelayanan sosial. Beberapa program telah dilaksanakan oleh pemerintah pada kepemimpinan kabinet kerja, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT).

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam penanganan fakir miskin adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program

Keluarga Harapan. Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Basis Data Terpadu (BDT) sebagai dasar umum menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk kedalam Desil I (Rumah Tangga Sangat Miskin). Kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH terdiri dari penduduk miskin yang memenuhi persyaratan berdasar pada aspek kesehatan yang dikhususkan pada ibu hamil dan balita dari rentan 0-6 tahun, aspek pendidikan seperti anak-anak yang sedang menempuh sekolah wajib belajar 12 tahun, serta aspek kesejahteraan sosial seperti lansia dan penyandang difabelitas. Tingginya angka kemiskinan di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah dengan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi. Berikut adalah data mengenai persentase penduduk miskin berdasarkan pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah, hal ini dapat dilihat dari bagan di bawah ini.



Gambar 1.1 Grafik Jumlah Penduduk Miskin Jawa Tengah Berdasarkan Kota Tahun 2021 – 2023

Sumber : BPS Jawa Tengah

Gambar 1.1 berdasarkan data dari BPS Jawa Tengah, bahwa dapat diketahui kabupaten/kota yang dengan jumlah presentase penduduk miskin tertinggi, pada tahun 2023 adalah Kota Semarang dengan jumlah penduduk miskin 642.456,00, lalu ada Kota Tegal dengan jumlah 623.617,00, Kota Magelang dengan jumlah 602.794,00, Kota Surakarta dengan jumlah, dan terakhir terdapat pada Kota Pekalongan dengan jumlah. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan tindakan penanganan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin di Kota Semarang. Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi adalah Kota Semarang. Berikut adalah data terkait jumlah penduduk miskin di Kota Semarang pada tahun 2021 sampai 2023.

Tabel 1.1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kota Semarang 2021-2023

Tahun	Jumlah Penduduk miskin (Ribu Orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
2021	84,45	4,56
2022	79,87	4,25
2023	80,53	4,23

Sumber : BPS Kota Semarang

Data dari BPS Kota Semarang 2021-2023, menjelaskan bahwa Kota Semarang tahun 2021 terdapat jumlah penduduk miskin sebanyak 84,45 ribu orang atau 4,56 persen dari total penduduk, menurun sekitar 79,87 ribu orang dari jumlah penduduk miskin tahun 2021 yang jumlahnya 84,45 ribu

orang (4,56 persen). Lalu naik kembali pada tahun 2023 sebesar 80,53 ribu orang atau 4,23 persen dari total penduduk Kota Semarang.

Tingginya angka kemiskinan di Kota Semarang juga dikarenakan beberapa kecamatan pada Kota Semarang masih tinggi pada angka kemiskinan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia masih harus berfokus pada upaya penanggulangan kemiskinan untuk dapat melakukan percepatan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah data jumlah rumah tangga miskin per kecamatan di Kota Semarang tahun 2023.

Tabel 1.2 Data jumlah rumah tangga miskin per kecamatan di Kota Semarang tahun 2023.

No	Kelurahan	Kategori Kemiskinan		
		Hampir Miskin	Miskin	Sangat Miskin
1	Meteseh	3.316	120	-
2	Rowosari	5.650	993	3
3	Mangunharjo	1.243	56	-
4	Bulusan	683	112	-
5	Kramas	457	109	-
6	Tembalang	186	28	-
7	Jangli	1.889	406	-
8	Tandang	7.106	1.465	-
9	Kedungmundu	501	110	-
10	Sendangguwo	5.582	241	-
11	Sendangmulyo	2.380	567	3
12	Sambiroto	2.089	242	-
	Jumlah	31.082	4.449	6

Sumber : BPS Kota Semarang

Berdasarkan data tabel 1.2, dapat diketahui bahwa berdasarkan pada jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Tembalang memiliki jumlah penduduk miskin dan hampir miskin banyak berada pada Kelurahan Tandang, Kelurahan Rowosari dan Kelurahan Sendangguwo. Jumlah Kartu Keluarga hampir miskin di Kelurahan Tandang 7.196 KK, sedangkan Kelurahan Rowosari berjumlah 1.631 KK. Dan Kelurahan Sendangguwo 5.582 KK. Kelurahan Sendangguwo termasuk dalam kelurahan dengan klasifikasi tingkat kemiskinan tertinggi ke 3 di Kecamatan Tembalang, yang perlu diketahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) .

Kemiskinan merupakan satu permasalahan yang wajib untuk segera ditangani. Peran dan upaya pemerintah sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan yang baik bagi masyarakat itu sendiri. Ada dua strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemiskinan yang terus meningkat ditengah-tengah masyarakat yaitu, pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Kedua, memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Abbas (dalam Daud dan Marini, 2018 : 33) menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat ialah suatu kondisi tercukupinya kebutuhan, tidak kekurangan apapun dalam batas yang

mungkin dicapainya merasa senang dan sejahtera, jiwanya tentram dan batinnya terpelihara, merasakan keadilan, dan terlepas dari kemiskinan yang menyiksa serta terhindar dari ancaman kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat apakah suatu negara tersebut dapat dikatakan miskin atau tidak. Tujuan utama suatu negara adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menilai keberhasilan pembangunan salah satunya adalah dengan mengurangi angka kemiskinan.

Kebijakan sosial yang dikembangkan untuk melindungi risiko dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, menangani kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan tunai bersyarat yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2007 sebagai upaya perlindungan sosial bagi keluarga miskin. Berdasar pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada seseorang ataupun keluarga miskin dan rentan yang sudah ditetapkan sebagai peserta program PKH dan terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Program PKH dibuat oleh Kementerian Sosial RI dengan landasan hukum Undang-undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan dasar penerapannya mengacu pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No. 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan”. Program Keluarga Harapan (PKH) ini dalam jangka pendek bertujuan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, untuk jangka menengah, dengan menetapkan syarat kepada keluarga penerima bantuan untuk berkomitmen untuk menyekolahkan anaknya, melakukan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, melakukan imunisasi balita, dan peningkatan perbaikan gizi, dan dalam jangka panjang, dampak dari pelaksanaan PKH dapat membantu dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial keluarga melalui kemandirian pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dan perubahan pola pikir, perilaku. PKH sendiri ditujukan kepada masyarakat miskin yang bertujuan secara umum untuk menurunkan dan memutus rantai kemiskinan, peningkatan kualitas SDM dan memberikan perubahan pola pikir kepada RTSM yang acuh terhadap kondisi peningkatan kesejahteraan sosial.

Program PKH adalah bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan bidang kesehatan dan pendidikan. PKH ditujukan kepada masyarakat miskin dengan memberikan bantuan uang tunai dengan kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta PKH, dan peserta PKH wajib berkomitmen untuk melaksanakan kewajibannya sebagai penerima PKH.

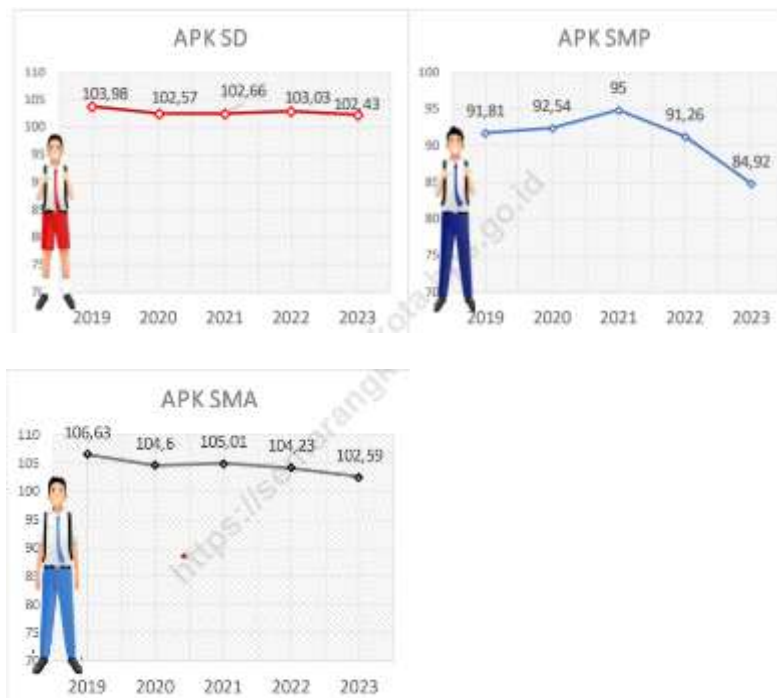
Tabel 1.3 Kriteria Komponen Kepesertaan PKH

Komponen	Kriteria
Kesehatan	a. Kategori ibu hamil/nifas
	b. Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun
Pendidikan	a. Kategori pendidikan anak SD/SMA sederajat
Kesejahteraan Sosial	a. Kategori penyandang disabilitas
	b. Kategori lanjut usia

Sumber : Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018

Ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, dalam pasal 6 ketentuan dimaksud adalah keluarga penerima PKH harus memenuhi kriteria komponen yang terdiri dari komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Komponen kesehatan meliputi ibu hamil/ menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. Komponen pendidikan meliputi: a) anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat; b) sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat; c) anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Komponen kesejahteraan meliputi: a) lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan b) penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. Bantuan diberikan dalam bentuk uang melalui rekening berupa bantuan tetap dan bantuan sesuai komponen dalam keluarga. Ketentuan pemberian bantuan komponen tersebut maksimal untuk 4 (empat) orang dalam satu keluarga.

PKH yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya masyarakat miskin melalui kegiatan memberdayakan penyandang disabilitas atau lanjut usia agar tetap melanjutkan kelangsungan hidup sehat. Misi besar kesuksesan PKH adalah menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Jumlah penerima program PKH dari 2007-2023 juga terus mengalami perkembangan di tiap tahunnya. Pelaksanaan program keluarga harapan yang berfokus pada dua bidang, dibidang pendidikan berusaha untuk mewujudkan peningkatan pendidikan anak usia sekolah, mengurangi putus sekolah dan sebagainya.. Kota Semarang dalam bidang pendidikan jumlah lulusan murid pada jenjang yang lebih tinggi juga tergolong masih rendah. Berikut adalah data terkait jumlah lulusan murid menurut di Kota Semarang pada tahun 2021-2023.



Gambar 1. 2 Banyaknya Partisipasi murid SD, SMP, dan SMA (SMA/SMK) Menurut Kota Semarang Tahun 2021-2023

Sumber: BPS Kota Semarang

Gambar diatas yang menyatakan terkait dengan jumlah lulusan murid SD/SMP/SMA menurut Kota Semarang pada tahun 2021-2023, untuk jumlah 102,66 partisipasi SD dari tahun 2021 menurun ke 103,03 di tahun 2022 dan menurun kembali pada tahun 2023 menjadi 102,43. Pada lulusan SMP terjadi penurunan dari 95 partisipasi pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 91,26 dan menurun kembali turun pada tahun 2023 sebanyak 84,92. Pada lulusan SMA terjadi penurunan yang berawal 105,01 pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 sebanyak 104,23 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 sebanyak 102,59.

Adanya program keluarga harapan sebagai salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang diharapkan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan pada kenyataannya belum mampu berjalan secara efektif, khususnya dalam bidang pendidikan. PKH dalam bidang pendidikan ini bertujuan agar para keluarga miskin memperoleh kemudahan dalam akses pendidikan, mewujudkan peningkatan pendidikan anak usia sekolah, dan sebagainya. Perubahan pola pikir dari masyarakat untuk dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi sudah meningkat walaupun jumlah lulusan murid di Kota Semarang pada jenjang yang lebih tinggi tergolong masih rendah.

Melansir dari (Kompasiana.com) Pemerintah Kota Semarang dalam menangani masalah ketidaktepatan sasaran penerima PKH di Kota Semarang, Jawa Tengah. Masalah anak tidak sekolah terus menjadi perhatian serius di Indonesia, termasuk di Kota Semarang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang tahun 2023, sekitar 6,5% anak usia sekolah di kota ini tidak mengenyam pendidikan formal. Faktor-faktor seperti keterbatasan ekonomi, masalah keluarga, dan kurangnya akses ke fasilitas pendidikan menjadi penyebab utama dari permasalahan ini.

Pelaksanaan PKH di lapangan, juga memunculkan berbagai permasalahan yang terjadi seiring dengan berlanjutnya program PKH. Beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) yaitu data base tidak akurat dan penyalahgunaan dana PKH. Hal tersebut terjadi karena tidak diupdatenya data penerima

manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) secara rutin, ditemukan pada saat penyaluran yaitu adanya penerima manfaat yang terkadang kondisi ekonominya mampu akan tetapi mendapatkan bantuan tersebut. Persoalan selanjutnya yaitu KPM PKH juga dalam memanfaatkan bantuan PKH yang diterima tidak digunakan dengan semestinya yaitu untuk membiayai peralatan sekolah. Selain itu KPM PKH sulit menerima sosialisasi yang diberikan oleh pendamping PKH, dan sebagainya. Tentunya hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program keluarga harapan di Kota Semarang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 dan buku pedoman pelaksanaan program keluarga harapan. Beberapa permasalahan dan kendala yang sudah di paparkan mengindikasikan kelemahan program keluarga harapan (PKH).

Melansir dari (laporgub.jatengprov.go.id) “ada penyalahgunaan dana bantuan pemerintah PKH di Kebonharjo RT3 RW4 Semarang Utara Semarang seorang bernama Prasetyo mendapat bantuan pemerintah PKH selama 3 tahun ini dan digunakan membeli motor honda beat baru sementara seorang janda bernama ibu tuti dan anaknya faizal terlantar dan tak bisa membayar sekolah karena satu kk dengan prasetyo ada manipulasi data harusnya yg dapat seorang ibu dan anaknya tapi malah diberikan ke prasetyo seorang.” Oleh karena itu pelaksanaan PKH khususnya di di Kota Semarang diperlukan evaluasi apakah bantuan PKH yang berupa uang tunai yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat sudah berhasil dalam mencapai tujuannya atau justru menimbulkan ketergantungan bagi

penerimanya. Sebab untuk melihat tingkat pencapaian keberhasilan suatu program dapat tercapai apabila sasaran dan tujuan program tersebut telah tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan dilakukannya kegiatan evaluasi. Berdasarkan penjabaran dari latar belakang maka perlu adanya evaluasi terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Semarang. Penelitian ini, peneliti ingin menjawab tujuan jangka pendek dalam program PKH, yaitu untuk dapat membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Adapun kategori penerima PKH yang ingin dikaji oleh peneliti yaitu pada kriteria komponen pendidikan. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk melihat kembali apakah bantuan program keluarga harapan (PKH) dalam bidang pendidikan berhasil mencapai tujuannya dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Semarang. Adapun pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini yaitu, “apakah Program Keluarga Harapan (PKH) mampu mencapai tujuannya?”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Ketepatan sasaran penerima PKH. Penentuan sasaran yang tepat dalam pelaksanaan suatu program menjadi faktor yang penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran penerima PKH di Kota Semarang masih banyak ditemukan penerima PKH yang tidak tepat sasaran.
2. Peserta PKH tidak memanfaatkan bantuan yang diterima dengan semestinya.

3. Pelaksanaan PKH belum mampu berjalan secara efektif, khususnya dalam bidang pendidikan. PKH dalam bidang pendidikan ini bertujuan agar para keluarga miskin memperoleh kemudahan dalam akses pendidikan, mewujudkan peningkatan pendidikan anak usia sekolah, dan sebagainya, akan tetapi jumlah lulusan murid di Kota Semarang jenjang yang lebih tinggi tergolong masih rendah.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang pendidikan Kota Semarang ?
2. Apa faktor penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang pendidikan Kota Semarang ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan di Kota Semarang.
2. Menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat Program Keluarga Harapan (PKH) bidang Pendidikan di Kota Semarang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagaimana diuraikan berikut ini;

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu administrasi publik, terutama yang berkaitan dengan ranah pelayanan publik pada

program yang berhubungan dengan peningkatan perbaikan atau evaluasi terhadap suatu program kebijakan publik

b. Kegunaan praktis

1. Bagi pihak Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, saran, dan informasi untuk dijadikan sebagai panduan ataupun pertimbangan bagi pihak instansi

Terkait evaluasi pelaksanaan suatu program atau kebijakan dalam pengentasan kemiskinan di Kota Semarang

2. Bagi Pihak Akademisi.

Hasil dari penelitian ini harpакannya dapata membantu proses praktik pembelajaran ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan kebijakan publik yang berkaitan dengan proses pengevaluasian suatu program dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi Pihak lain

Penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan, data informasi ataupun sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya, untuk bisa dikembangkan dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya serta sebagai bahan pertimbangan sutau instansi dalam menangani permasalahan yang sama.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
1.	IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SISIR KECAMATAN BATU KOTA BATU	untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan.	Implementasi Kebijakan Publik Menurut Teori George C. Edwards III (dalam Riant Nugroho, 2009:636) Dalam pandangan, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain	deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini Implementasi PKH dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan dapat dilihat dari empat hal yaitu proses komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang dilakukan sudah baik dengan adanya tanggungjawab, rasa kepedulian, memberikan motivasi dan menggugah kesadaran peserta program keluarga harapan dalam memenuhi tujuan

					dan harapan yang diinginkan.
2.	IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENANGGULANGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BATU (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)	Untuk mendokumentasikan bagaimana lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Batu telah dilayani oleh Program Keluarga Harapan (PKH).	Menurut Edward III dalam Nugroho (2017), ada empat indikasi implementasi kebijakan yang baik: struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Penelitian ini berfokus pada elemen-elemen tersebut	deskriptif kualitatif	(1) Program Keluarga Harapan (PKH) telah berhasil dilaksanakan di Kota Batu untuk membantu masyarakat miskin, dengan mengikuti seluruh peraturan dan pedoman terkait. Namun terdapat beberapa data penerima yang tidak akurat pada saat pelaksanaan di lapangan sehingga menyebabkan PKH ini tidak mencapai tujuannya. Persepsi masyarakat terhadap Kebijakan PKH

					merosot akibat tidak kompetennya proses nominasi calon penerima PKH. (2) Alasannya antara lain memiliki staf yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung PKH di Kota Batu, dan fakta bahwa kota ini secara geografis kompak (hanya mencakup tiga kecamatan), yang membuat pengelolaan administratif dan memantau dengan mudah.
3.	Gerak Langkah Program Keluarga Harapan: Kontribusi Program Keluarga Harapan	mendeskrripsikan kontribusi PKH, faktor pendukung dan penghambatnya terhadap	Teori evaluasi menggunakan teori William Dunn (2008:429), yaitu efektifitas,	kualitatif deskriptif	menunjukkan, bahwa PKH berkontribusi kepada peningkatan

	Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat	kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang.	efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan		kesejahteraan keluarga, khususnya mereduksi kekurangan kualitas dan kuantitas pangan, kesehatan, dan pendidikan, sehingga KPM cenderung lebih Sejahtera
4.	Optimalisasi Program Keluarga Harapan (PKH): meliputi Partisipasi, Pemberdayaan, dan Kinerja Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pulau Panggung	paya pengentasan kemiskinan belum mampu memberikan dampak besar, sehingga tujuan dari pembangunan nasional terkait masalah pemerataan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah berkepanjangan.	implementasi kebijakan dan dijadikan sebagai pijakan dalam pelaksanaannya. Menurut George Edwards (dalam Nugroho 2003: 168),	kualitatif deskriptif	Dalam pelaksanaannya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan di Kecamatan Purwoasri bertujuan untuk memberikan bukti nyata dalam pencapaian tujuan. Hasil Evaluasi membuktikan bahwa penerima PKH setiap

					tahunnya mengalami penurunan.
5.	PENGARUH PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI KOTA PADANG PANJANG	juan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh terhadap kesejahteraan Keluarga Penerima Mafaat (KPM) di Kota Padang Panjang.	teori efektivitas oleh Sutrisno dalam Urika Tri Astari (2018) yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.	kuantitatif	Temuan yang diperoleh penulis pada penelitian ini adalah R Square menunjukkan nilai sebesar 0,334 artinya persentase pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat sebesar 33,4% sisanya 67,6% dipengaruhi faktor lain. Dalam persamaan regresi didapat $Y = 8,790 + 0,843X$, dimana PKH

					berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan KPM. Pengujian hipotesis didapat t hitung 6,722. Maka t hitung > dari t tabel (1,998447) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.
6.	IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA CEMPAKA NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	untuk membangun sistem perlindungan sosial dalam rangka memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin.	Menurut Edward III dalam Nugroho (2017), ada empat indikasi implementasi kebijakan yang baik: struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Penelitian ini berfokus pada	kualitatif	Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cempaka Nuban belum maksimal dalam mensejahterakan rumah tangga miskin.

			elemen-elemen tersebut		
7.	Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)	untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, dan kendala dalam Program Keluarga Harapan agar dapat diperbaiki lagi kedepannya	perubahan kondisi ekonomi, perubahan kualitas kesehatan, dan perubahan kualitas Pendidikan (Sari, et.al, 2020):	deskriptif analitis	menunjukkan bahwa Dampak program yang dilaporkan oleh berbagai studi belum menghubungkan dengan tingkat penurunan kemiskinan
8.	Dampak Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Banjar Tahun 2013 – 2018	(1) Mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Banjar. (2) Mengetahui dampak kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar.	implementasi kebijakan dan dijadikan sebagai pijakan dalam pelaksanaanya. Menurut George Edwards (dalam Nugroho 2003: 168)	kualitatif deskriptif	menunjukkan bahwa dampak kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Banjar berdampak positif terhadap penanggulangan kemiskinan.

9.	IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN MALANG	untuk mengkaji proses implementasi program keluarga harapan pada masa pandemi Covid-19 yang melibatkan organisasi pemerintah sebagai implementator dan masyarakat (KPM) sebagai kelompok sasarannya.	implementasi kebijakan dan dijadikan sebagai pijakan dalam pelaksanaannya. Menurut George Edwards (dalam Nugroho 2003: 168).	deskriptif pendekatan kualitatif.	bahwa implementasi PKH pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Malang yang meliputi perencanaan PKH, pertemuan awal dan validasi PKH, penetapan KPM PKH, penyaluran dana bantuan PKH, pemutakhiran data KPM PKH, verifikasi komitmen KPM, pendampingan PKH telah berjalan dengan bagi menyesuaikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.
10.	IMPLEMENTASI PELAYANAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN	Implementasi bertujuan untuk penerapan program	implementasi kebijakan dan dijadikan sebagai	deskriptif kualitatif.	diharapkan menjadi bahan perbandingan

	(PKH) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN HIDUP MASYARAKAT MISKIN	keluarga harapan (PKH) mensejahterakan hidup masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup kesehatan, pendidikan dan ekonomi.	pijakan dalam pelaksanaanya. Menurut George Edwards (dalam Nugroho 2003: 168)		instansi terkait dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
--	---	---	--	--	--

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2025)

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi Publik Menurut Inu Syafiie Kencana (dalam Sari dan Aufarul, 2020: 5) menyatakan definisi dari administrasi publik adalah: “(1) Administrasi publik adalah sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan pemerintah yang telah dirumuskan oleh lembaga representasi politik. (2) Administrasi publik diartikan sebagai suatu bentuk proses kerjasama baik dengan perorangan ataupun kelompok dalam pelaksanaan kebijakan publik. (3) Administrasi publik adalah suatu bentuk proses yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan-peraturan publik dengan penggunaan teknik-teknik dimaksudkan untuk pemberian pengarahan kepada usah seseorang.”

Inu Syafiie Kencana (dalam Sari dan Aufarul, 2020 : 6) mengemukakan bahwa administrasi publik yakni suatu ilmu yang berkaitan dengan bagaimana berbagai macam badan pemerintahan yang diorganisasikan, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin, serta diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya.

George J. Gordong (dalam Nurfauziah & Herbasuki, 2020:4) mengungkapkan bahwa administrasi publik merupakan suatu rumusan yang dilakukan oleh organisasi ataupun perorangan yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu peraturan kebijakan, ataupun hukum yang ditetapkan oleh badan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Selanjutnya Henry (dalam Nurfauziah & Herbasuki, 2020:5) menyatakan bahwa administrasi publik adalah perpaduan yang kompleks antara praktik dan

teori yang ditujukan untuk memberikan pengetahuan ataupun pemahaman kepada pemerintah dalam kaitannya dengan masyarakat yang di perintah serta sebagai upaya untuk memajukan kebijakan publik agar lebih responsif akan kebutuhan sosial. Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli mengenai administasi publik, maka dapat disimpulkan bahwa administasi publik merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan kelompok ataupun perorangan dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Istilah paradigma mengacu pada gagasan yang digunakan spesialis untuk menjelaskan keadaan sains saat ini atau sudut pandang ilmiah untuk memeriksa peristiwa sosial yang telah terjadi di masyarakat. Paradigma, dalam pandangan Kuhn, adalah metode memahami realitas sosial yang dikembangkan oleh gaya penyelidikan atau pemikiran tertentu yang menghasilkan bentuk pengetahuan tertentu. Berikut ini adalah interpretasi dari enam paradigma administrasi publik.

1) Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Istilah "dikotomi politik dan administratif" mengacu pada paradigma pertama, yang ada antara tahun 1900 dan 1926. Paradigma ini—di mana administrasi seharusnya—adalah topik diskusi. Ada dua tokoh dalam predikat ini: Leonard D. White dan Frank J. Goodnow. Melalui makalah yang mereka tulis berjudul "Politik dan Partisipasi" (1900), Frank J. Goodnow terlibat. Melalui upaya ini, Frank J. Goodnow dan Leonard D. White Goodnow mengklarifikasi bahwa pemerintah akan mengawasi

pelaksanaan kebijakan dan bahwa kebijakan harus berpusat pada langkah-langkah yang sesuai dengan kepentingan rakyat. Pembagian pemerintahan menjadi tiga cabang selanjutnya ditunjukkan oleh pembagian antara politik dan administrasi: cabang legislatif, yang mewakili kehendak rakyat; cabang eksekutif, yang melaksanakan kehendak rakyat; dan cabang yudisial, yang membantu membentuk politik cabang legislatif untuk menyelaraskannya dengan tujuan rancangan kebijakan. Paradigma tersebut menyajikan sudut pandang administrasi publik, yaitu nilai yang independen dan terfokus terhadap tujuan ekonomi dan efisiensi birokrasi pemerintahan. Ada tantangan dalam mempraktikkannya; Tantangan-tantangan ini berasal dari konsentrasi eksklusif paradigma pada unsur belalang, yaitu birokrasi pemerintah, yang berarti bahwa strategi pembangunannya adalah.

2) Paradigma II: Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Paradigma prinsip administrasi adalah paradigma kedua, yang berlaku dari tahun 1927 hingga 1937. Menurut paradigma ini, prinsip-prinsip administrasi sedang dikembangkan dan berada di puncak pengakuan dalam administrasi negara. Konsep administrasi pertama kali disajikan sebagai penekanan utama administrasi publik oleh Willoughby, Gullick, dan Urwick. Konsep perencanaan, pengorganisasian, personel, kepemimpinan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran (POSDCORB) — yang mencakup fasilitas, perencanaan, organisasi, personel, arahan, koordinasi, pelaporan, penganggaran, dan universal di Indonesia—adalah

aplikasi yang terkenal dari ide-ide ini. Paradigma ini berbeda dari paradigma I karena berpusat pada administrasi publik dan belalang. Paradigma ini menjelaskan fokus administrasi publik, yaitu fungsi dan prinsip manajemen. Ini juga memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh tentang belalang, membuat orang percaya bahwa paradigma ini menunjukkan universalitas penekanan. Saat menerapkan paradigma ini, pentingnya fokus diprioritaskan daripada pentingnya belalang.

3) Paradigma 3 : Administrasi sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Gagasan bahwa ilmu politik dapat diterapkan pada administrasi negara berfungsi sebagai paradigma ketiga antara tahun 1950 dan 1970. Memulihkan hubungan konseptual antara ilmu politik dan administrasi negara adalah tujuan dari tahap ini. Topik apakah politik dan administrasi tidak dapat dipisahkan diajukan oleh Morstein-Marx, editor buku *Elements of Public Administration* tahun 1946. Herbert Simon keberatan dengan modifikasi konsep administratif, menyatakan bahwa itu tidak lagi berfungsi sebagai pedoman universal. Ada perdebatan antara argumen yang berharga dari segi kebijakan dan argumen yang tidak berharga dari segi administrasi. Kedua argumen ini, pada kenyataannya, sama-sama masuk akal. Konsep administrasi publik John Gauss dihasilkan dari ini. Karena banyaknya kekurangan dalam prinsip-prinsip administrasi publik, administrasi publik kemudian menggunakan paradigma ini untuk mengembangkan ilmu politik dengan belalang dalam birokrasi pemerintahan dan penekanan abstrak. Kekurangan di bidang administrasi publik adalah hilangnya identitas dalam prinsip-prinsip panduan profesi,

yang pada gilirannya membentuk atau mengendalikan disiplin kedua belah pihak. Menurut paradigma ini, efek dominasi disiplin politik atas prinsip-prinsip administrasi menjelaskan hubungan erat antara administrasi publik dan politik, yang terbukti dalam fokus abstrak lapangan. Dalam paradigma ini, birokrasi pemerintah kemudian berubah menjadi focal point.

4) Paradigma 4: Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Administrasi negara sebagai ilmu administrasi adalah paradigma keempat yang berlaku dari tahun 1956 hingga 1970. Paradigma ini hanya memajukan ide-ide yang sudah diterima. Fokus paradigma ini mengarah pada penerapan teknologi kontemporer termasuk metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi, dan perilaku organisasi serta analisis manajemen. Beberapa hal terjadi selama ini, seperti argumen Keith M. Henderson tahun 1960 bahwa teori organisasi harus menjadi prioritas utama administrasi negara dalam rangka mempercepat pertumbuhan pengembangan organisasi (OD) sebagai spesialisasi ilmu administrasi. Paradigma ini sedang dikembangkan dalam dua bidang: orientasi kebijakan publik dan pengembangan ilmu administrasi, yang sedang diperkuat oleh psikologi sosial. Karena dapat diterapkan pada bidang administrasi publik, yang menghasilkan abstrak belalang, evolusinya fleksibel.

5) Paradigma 5: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970- 1990)

Paradigma administrasi negara sebagai administrasi negara, dengan titik fokus dan belalang yang berbeda, merupakan paradigma keenam yang berubah dari tahun 1970 hingga saat ini. Tujuan utama paradigma ini adalah kebijakan publik, teori manajemen, dan teori organisasi; belalangnya adalah masalah dan kepentingan publik. Ketepatan fokus dan belalang membedakan paradigma ini dari beberapa paradigma sebelumnya.

6) Paradigma 6 : Governance (1990-sekarang)

Paradigma keenam, atau paradigma pemerintahan, diperkenalkan pada tahun 1990. Paradigma keenam, yang terbaru dari yang dikemukakan sebelumnya, didasarkan pada pengembangan ilmu administrasi publik. Panji Santosa mengidentifikasi ketiga pilar paradigma ini dalam bukunya "Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Tata Kelola yang Baik": sektor publik, sektor komersial, dan masyarakat. Pengaruh pemerintah yang mengendalikan pemerintahan inilah yang membedakan paradigma ini dari yang lain. Pergeseran tata kelola pemerintahan yang menekankan integrasi sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil ke dalam stabilitas untuk menjamin kemajuan paradigma ini untuk pemerintahan yang baik. Penelitian ini sejalan dengan paradigma administrasi publik yang kelima pada tahun 1970 ialah Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara yang titik fokus dan lokusnya telah tergambar dengan jelas. Fokus paradigma ini ialah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya ialah masalah-masalah dan kepentingan-

kepentingan publik. Berdasarkan kerangka tersebut Program PKH yang bertujuan untuk pelayanan publik yang berbentuk membantu masyarakat miskin sesuai dengan paradigma ini.

1.6.4 Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (dalam Sari dan Aufarul, 2020 : 6) berpendapat mengenai kebijakan publik, menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah segala bentuk tindakan yang dibuat atau tidak dibuat oleh pemerintah. Sedangkan menurut J Anderson (dalam Sari dan Aufarul, 2020 : 6) mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai suatu peraturan bentuk keputusan yang telah dirumuskan oleh lembaga pemerintahan. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam (Sari dan Aufarul, 2020 : 6) yang menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang dibuat atau tidak dibuat oleh pemerintah yang diputuskan dalam bentuk baik berupa peraturan ataupun berupa statement yang berbentuk lisan atau tulisan yang disampaikan oleh para aktor publik untuk kemudian dilakukan tindakan lanjutan berupa program yang dikeluarkan ataupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan publik dalam prosesnya terdapat beberapa langkah dalam hal pengambilan dan menetapkan sebuah keputusan. Beberapa langkah yang digunakan dalam kebijakan publik dengan tujuan agar proses yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Adapun

menurut William Dunn dalam (Winarno, 2012 : 35-37), tahapan proses dalam pembuatan kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Tahap Penyusunan Agenda

Pada tahap penyusunan agenda ini, para perumus kebijakan meletakkan berbagai permasalahan yang terdapat pada agenda publik. Masalah-masalah yang ada diseleksi menurut tingkat urgensi untuk kemudian diproses ke dalam pembahasan agenda kebijakan. Selanjutnya berbagai permasalahan yang ada di agenda kebijakan untuk kemudian dirumuskan oleh para perumus kebijakan. Akan tetapi tidak semua masalah dapat dibahas akan tetapi tetap menjadi fokus dalam pembahasan dan ada juga permasalahan yang ditunda pembahasannya karena lamanya waktu yang dibutuhkan.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Pada tahap formulasi kebijakan ini, masalah yang sudah di proses di agenda kebijakan selanjutnya dilakukan pembahasan oleh para perumus kebijakan. Masalah yang ada di bahas untuk mencari alternatif solusi pemecahan masalah yang terbaik. Solusi alternatif pemecahan masalah diperoleh dari berbagai alternatif pilihan kebijakan yang ada. Beberapa alternatif yang ada diseleksi untuk kemudian dipilih sebagai kebijakan yang tepat dalam menangani permasalahan tersebut. Pada tahap ini juga masing-masing aktor

kebijakan saling memberikan pendapat terkait dengan alternatif solusi pemecahan masalah yang tepat dan terbaik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Tahap Adopsi kebijakan yakni berbagai alternatif yang ada yang telah diberikan oleh para perumus kebijakan, selanjutnya diproses dengan memilih salah satu alternatif yang akan diadopsi dimana alternatif yang akan diadopsi tersebut dipilih dengan kriteria alternatif solusi yang mendapat dukungan paling banyak dari mayoritas konsensus antara direktur dan putusan pengadilan, dan anggota legislatif.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Setiap kebijakan yang sudah diputuskan oleh para perumus kebijakan sebagai alternatif pemecahan masalah. Langkah selanjutnya yaitu mengimplementasikan kebijakan tersebut yang dapat dilakukan oleh para pejabat publik, berbagai badan administrasi dan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Kebijakan yang telah diputuskan selanjutnya diimplementasikan di lapangan. Pada tahap implementasi ini diikuti dengan berbagai kepentingan yang saling bersaing. Pada implementasi kebijakan di lapangan pasti selalu diwarnai dengan adanya dukungan pelaksana kebijakan akan tetapi juga memungkinkan terjadinya pertentangan dari pelaksana kebijakan terkait dengan hadirnya kebijakan tersebut.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah diimplementasikan selanjutnya dilakukan penilaian atau evaluasi guna mengamati dan mengukur sudah sejauh mana kebijakan yang ada telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat memecahkan masalah. Suatu kebijakan publik dibuat oleh para pembuat kebijakan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang diinginkan, yaitu membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga dalam hal ini untuk mengetahui apakah manfaat dari kebijakan tersebut telah didapatkan maka dibutuhkan beberapa kriteria yang digunakan untuk mengukur dan melakukan penilaian apakah kebijakan tersebut telah mendapatkan manfaat yang telah direncanakan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang telah diuraikan mengenai kebijakan publik, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah suatu peraturan atau program yang dirumuskan oleh para pembuat kebijakan untuk di implementasikan di lapangan, dan dilakukan evaluasi kebijakan untuk mengetahui dampak dan mafaat dari kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan bagian dari studi kebijakan yaitu tahapan evaluasi.

1.6.5 Evaluasi Kebijakan

Konsep Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang selalu beriringan dengan sebuah kebijakan publik. Evaluasi memiliki peranan penting dalam siklus kebijakan yang sama pentingnya dengan formulasi juga implementasi kebijakan. Dye (2002 : 45) mengemukakan bahwa evaluasi merupakan konsekuensi dari kebijakan publik. Selanjutnya Dye (dalam Parsons 2008:545) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan suatu kegiatan pemeriksaan yang sistematis, objektif dan empiris terhadap dampak dari kebijakan publik maupun program terhadap sasaran dari segi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau tujuan yang ingin dicapai. Subarsono (2016: 119) juga memberikan pendapat mengenai evaluasi yaitu suatu kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu program atau kebijakan publik. Sedangkan Badjuri dan Admin (dalam Pasolong, 2013 : 60) mengatakan bahwa salah satu hal penting dalam kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Suatu kebijakan publik yang tidak tercapai tujuannya biasanya karena mengalami resistensi., oleh karena itu setiap kebijakan yang berjalan perlu dievaluasi untuk mengetahui penyebab, kendala, dan bagaimana solusi yang harus diambil, apakah kebijakan itu harus diperbaharui, dihentikan. Parsons (2008: 545) menyebut bahwa evaluasi mengandung dua aspek yang saling terkait, yaitu evaluasi kebijakan dan kandungan programnya, evaluasi terhadap orang-orang yang bekerja di dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk implementasi kebijakan dan program.

Menurut Sudiro (2018:63), William N. Dunn, evaluasi istilah Kebijakan sama dengan interpretasi, penilaian, dan pelaporan numerik. Dalam hal ini, mengevaluasi manfaat dan nilai hasil kebijakan; Jadi, evaluasi kebijakan perlu menawarkan data yang akurat dan dapat dipahami mengenai pemenuhan kebijakan. Untuk lebih ringkas, Dunn menyatakan bahwa evaluasi mendorong refleksi pada nilai-nilai yang memandu pemilihan tujuan. Nilai umumnya dapat dipertanyakan dengan membaca dengan cermat tentang kesiapan tujuan dan sasaran William N. Dunn (Dunn,2003:434) mencantumkan enam kriteria berikut untuk mengevaluasi kebijakan:

a. Efektivitas

Kata "efektif" (efisien) mengacu pada keberhasilan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut William N. Dunn, kemanjuran adalah sejauh mana suatu opsi akan mencapai hasil yang diinginkan atau tujuan kegiatan. Rasionalitas teknis selalu dievaluasi dalam hal produk atau unit layanan atau nilai moneter. (Dunn, 2003:429).

b. Efisiensi

Jika sumber daya digunakan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan, efisiensi akan terjadi. Menurut William N. Dunn, efisiensi adalah ukuran kuantitas pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi adalah hubungan antara upaya, yang biasanya dinyatakan dalam pengeluaran moneter, dan efisiensi, yang

identik dengan rasionalitas ekonomi. Efisiensi biasanya dinilai dengan mencari tahu berapa biaya satu unit barang atau jasa. Efisiensi mengacu pada kebijakan yang memaksimalkan output dengan biaya terendah (Dunn, 2003: 430).

c. Perataan

Ada berbagai metode untuk mendefinisikan kecukupan kebijakan publik yang memadai. Menurut William N. Dunn, kecukupan ditentukan oleh seberapa baik tingkat efisiensi memenuhi peluang, nilai, atau kebutuhan yang berkontribusi pada masalah (Dunn, 2003: 430). Dalam gagasan yang dijelaskan di atas, kecukupan masih dapat dikaitkan dengan efisiensi dengan mengukur sejauh mana solusi alternatif memenuhi persyaratan, nilai, atau kapasitas yang terkait dengan pemecahan masalah.

d. Responsivitas

Demi kebijakan publik, keadilan yang diberikan dan diterima dapat dianggap memiliki arti yang sama dengan pemerataan. Menurut William N. Dunn, persyaratan kesetaraan yang dekat mencerminkan alokasi hasil dan upaya di antara berbagai kelompok sosial dan terhubung dengan alasan hukum dan sosial (Dunn, 2003: 434). Kebijakan yang terasa sangat yakin bahwa program mungkin cukup, berhasil, dan efektif asalkan biaya manfaat dibagi rata dikenal sebagai

kebijakan berbasis pemerataan. Keadilan, atau keadilan, adalah kunci kesetaraan.

e.Ketepatan

Untuk menerapkan kebijakan, seseorang harus menanggapi tujuan kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa reaksinya difokuskan pada seberapa baik kebijakan dapat mengakomodasi tuntutan, preferensi, atau nilai-nilai pengelompokan sosial tertentu (Dunn, 2003:437). Reaksi publik terhadap penerapan kebijakan menunjukkan tingkat keberhasilannya. Reaksi publik ketika efek kebijakan dirasakan dengan baik adalah dukungan. Revisi kekuatan, otoritas, strategi, dan kepentingan aktor untuk mendukung eksekusi kebijakan adalah salah satu kekuatan, kepentingan, dan strategi mereka. Unsur pokok evaluasi kebijakan publik adalah elemen utama melaksanakan penilaian atas kebijakan, program, kegiatan, dan intervensi pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan sosial. Unsur pokok evaluasi kebijakan hendaknya meliputi beberapa poin sebagai berikut (Tangkilisan dalam Pratama dan Ajeng, 2018:151).

1. Tujuan (goals), termasuk kendala normatif dan pertimbangan relatif untuk mencapai tujuan (goals).
2. Kebijakan, program, proyek, keputusan, pilihan, sarana, atau alternatif lain yang tersedia untuk mencapai tujuan.

3. Hubungan antara kebijakan dan tujuan, termasuk hubungan yang terbentuk oleh intuisi, kewenangan, statistik, pengamatan, deduksi, perkiraan, atau sarana lain.
4. Penarikan kesimpulan tentatif sebagai kebijakan atau kombinasi kebijakan yang mana paling baik untuk diadopsi dalam hal tujuan, kebijakan dan hubungan.
5. Menentukan apa yang akan dilakukan untuk memetakan alternative kebijakan.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan untuk menilai tingkat kinerja program atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.

Alasan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi sangat berguna untuk keperluan jangka panjang dan untuk kepentingan keberlanjutan suatu program. Subarsono (2016:120-122), evaluasi memiliki beberapa argumen terkait dengan perlunya evaluasi yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya.
2. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.

3. Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah.
4. Menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan. Apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan, para stakeholder, terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program.
5. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak melakukan kesalahan yang sama.

Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Subarsono (2016 : 120-122) Evaluasi kebijakan memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Menilai kinerja suatu program atau kebijakan. Adanya evaluasi dapat diketahui sasaran kebijakan dan seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya.
2. Mengetahui tingkat efisiensi kebijakan dengan melihat berapa biaya dan apa manfaat dari pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) kebijakan. Tujuan dari evaluasi suatu kebijakan adalah mengukur seberapa besar dan kualitas pengeluaran dari suatu kebijakan.

4. Menilai dampak dan manfaat yang ditimbulkan dari suatu kebijakan. Evaluasi dilakukan untuk melihat dampak positif dan dampak negatif dari kebijakan yang diimplementasikan.
5. Menghindari adanya penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan yang mungkin terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara sasaran kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai.
6. Masukan untuk proses pengambilan kebijakan yang akan datang.

Pendekatan-Pendekatan dalam Evaluasi Kebijakan

William N. Dunn (Dunn, 2003:429) menjelaskan bahwa ada beberapa pendekatan dalam evaluasi kebijakan publik, guna menghasilkan penilaian yang baik, pendekatan-pendekatan tersebut diantaranya :

1. Evaluasi Semu (*pseudo evaluation*), ialah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil kebijakan terhadap individu, kelompok, ataupun masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari model evaluasi ini adalah bahwa ukuran tentang manfaat dan nilai merupakan suatu yang dapat terbukti sendiri oleh ukuran masing-masing individu, kelompok atau pun masyarakat.
2. Evaluasi formal (*formal evaluation*), tujuan evaluasi formal adalah untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan yang didasarkan atas tujuan formal program

kebijakan secara deskriptif. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target yang diumumkan secara formal merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. Dalam model ini terdapat tipe-tipe untuk memahami evaluasi kebijakan lebih lanjut, yakni :

- a. Evaluasi sumatif, yang berusaha untuk memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waktu untuk jangka waktu tertentu.
- b. Evaluasi formatif, suatu tipe evaluasi kebijakan yang berusaha untuk meliputi usaha-usaha secara terus menerus dalam rangka memantau pencapaian tujuantujuan dan target-target formal.

Tipe evaluasi formal, terdapat variasi-variasi model evaluasi kebijakan formal, diantaranya :

- a) Evaluasi perkembangan, dalam varian ini evaluasi formal berupaya untuk menunjukkan kegiatan/aktivitas evaluasi kebijakan secara eksplisit yang diciptakan untuk melayani kebutuhan sehari-hari staf proogram.
- b) Evaluasi proses restrospektif, yang meliputi pemantauan/evaluasi program setelah program tersebut diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Varian ini cenderung dipusatkan pada masalah-masalah dan kendala-kendala yang terjadi selama implementasi berlangsung, yang berhubungan dengan keluaran dan dampak yang diperoleh.

- c) Evaluasi eksperimental, adalah evaluasi kebijakan yang lahir dari hasil kondisi kontrol langsung terhadap masukan dan proses kebijakan.
- d) Evaluasi hasil restrospektif, yang meliputi pemantauan dan evaluasi hasil tetapi tidak disertai dengan kontrol langsung terhadap masukan- masukan dan proses kebijakan yang dapat dimanipulasi.
3. Evaluasi keputusan teoritis (decision-theoretic evaluaion) adalah pendekatan evaluasi kebijakan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan valid menangani hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

Tabel 1.4 Pendekatan Evaluasi

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk-bentuk Utama	Teknik
Evaluasi Semu	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi valid tentang hasil kebijakan	Ukuran atau manfaat terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial	1.Eksperimental sosial. 2.Akuntansi sistem sosial 3.Pemeriksaan sosial 4.Sintesis riset dan praktek	1 Sajian grafik. 2.Tampilan tabel 3. Angka indeks 4. Analisis seri waktu terinterupsi 5. Analisis seri terkontrol 6.Analisis diskontinuregresi
Evaluasi Formal	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan	Tujuan dan sasaran pengambil kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran	1.Evaluasi perkembangan 2. Evaluasi eksperimental 3. Evaluasi proses Retrospektif (Ex-Post)	1.Pemetaan sasaran. 2.Klarifikasi nilai. 3.Kritik nilai. 4.Pemetaan hambatan. 5.Analisis dampak silang'

	secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan	yang tepat dari manfaat atau nilai	4. Evaluasi hasil restrospektif	6.Discounting.
Evaluasi Keputusan Teoritis	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan.	Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam merupakan ukuran yang tepat dan manfaat atau nilai.	Penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi. Analisis utilitas atribut (serangkaian prosedur yang diciptakan untuk mengambil dari para pelaku kebijakan yang banyak memiliki pandangan subjektif tentang probabilitas	Brainstorming Analisis argumentasi Delphi kebijakan Analisis survey pemakai (serangkaian prosedur untuk mengumpulkan informasi dari calon pemakai dan pelaku-pelaku kebijakan lainnya mengenai

Sumber : Dunn Pengantar Analisis Kebijakan Tujuan Publik (Dunn, 2003:429)

1.6.6 Implementasi Kebijakan Publik

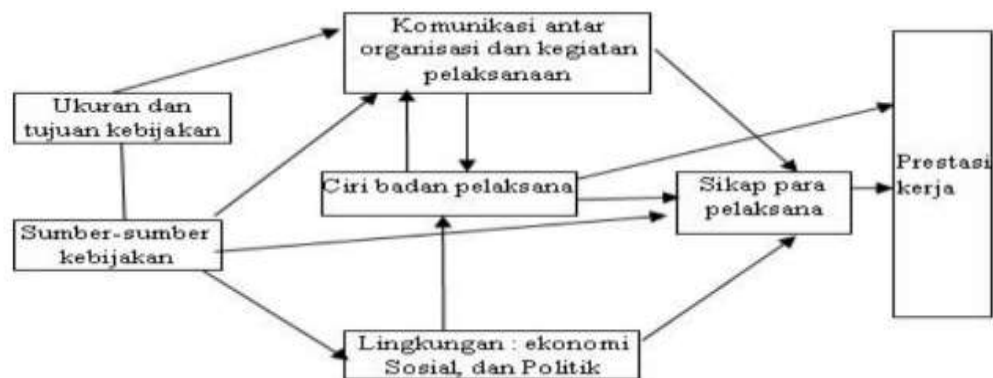
Pengertian implementasi selain menurut Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa implementasi sebagai tindakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Faktor merupakan suatu kepastian dalam menilai keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik sehingga kurang atau hilangnya salah satu faktor sangat berpengaruh terhadap kinerja kebijakan tersebut. Beberapa faktor yang menunjang keberhasilan pelaksanaan berdasarkan dengan

pendapat yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn (1975) adalah sebagai berikut :

1. Standar kebijaksanaan dan tujuan, yaitu rincian tujuan keputusan kebijaksanaan secara menyeluruh yang berwujud dokumen peraturan menuju penentuan standar yang spesifik dan konkrit untuk menilai kinerja program.
2. Sumber daya ialah kebijaksanaan mencakup lebih dari sekedar standar sasaran, tapi juga menuntut ketersediaan sumber daya yang akan memperlancar implementasi. Sumber daya ini dapat berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif.
3. Hubungan antar organisasi, yaitu implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedur institusional yang mengatur pola komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang terendah.
4. Karakteristik agen pelaksana: meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislative dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.
5. Disposisi sikap para pelaksana, ialah persepsi pelaksana dalam organisasi dimana program itu diterapkan, hal ini dapat berubah sikap menolak, netral dan menerima yang berkaitan dengan sistem nilai pribadi, loyalitas, kepentingan pribadi dan sebagainya.

6. Kondisi sosial, ekonomi dan politik: pengaruh variabel lingkungan terhadap implementasi program, diantaranya sumber daya ekonomi yang dimiliki organisasi pelaksana, bagaimana sifat opini publik, dukungan elit, peran, dan kelompok-kelompok kepentingan dan swasta dalam menunjang keberhasilan program.

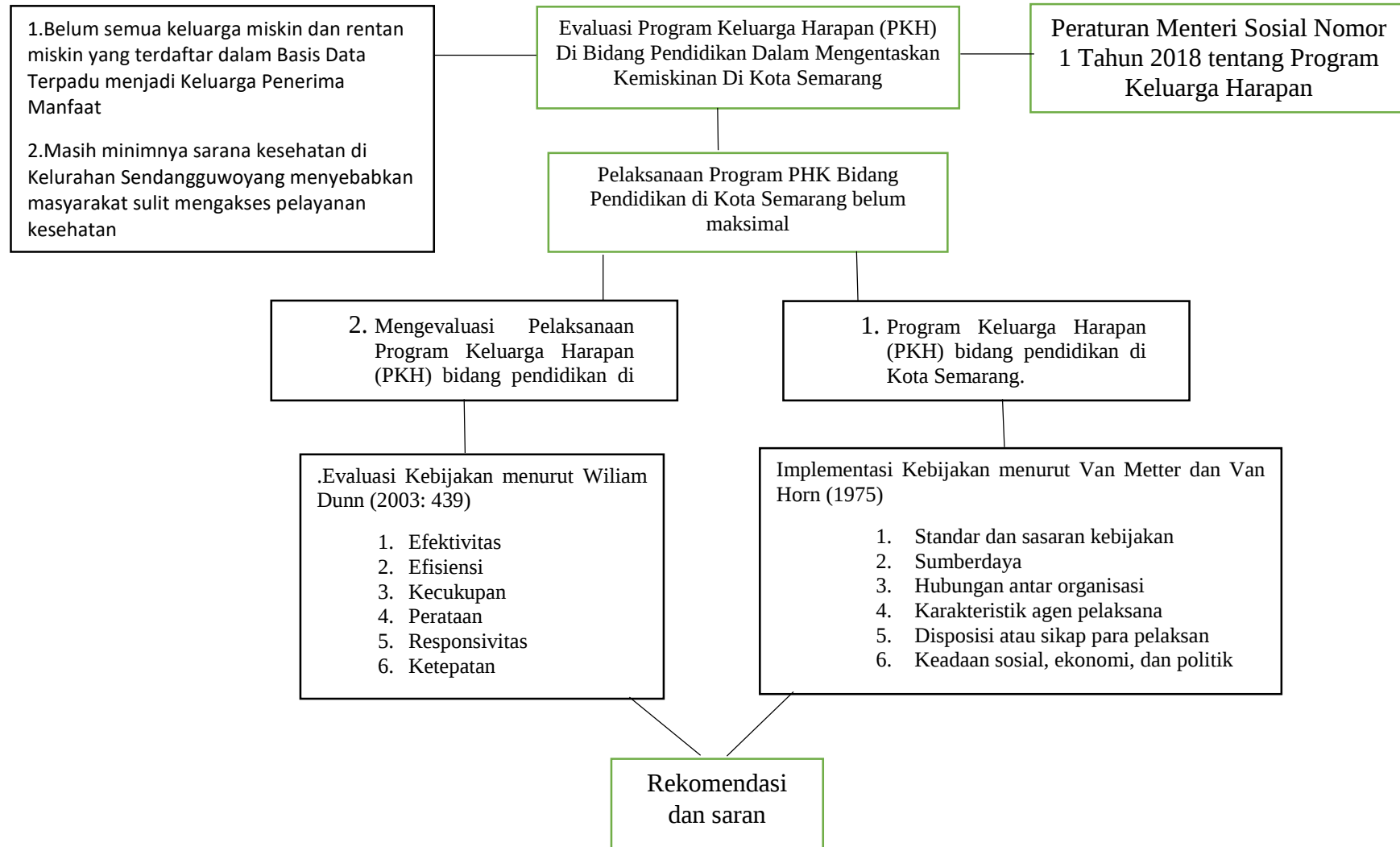


Model dari Van Meter dan Van Horn (1975) ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan model yang sangat kompleks, dimana satu variabel dapat mempengaruhi variabel yang lain seperti:

1. Variabel sumber daya dapat mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi dan politik.
2. Variabel sumber daya juga dapat mempengaruhi komunikasi antar badan pelaksana.
3. Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi karakteristik badan pelaksana.
4. Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi sikap badan pelaksana.

5. Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja kebijakan.
6. Komunikasi antar badan pelaksana memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dengan karakteristik badan pelaksana.
7. Komunikasi antar badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap pelaksana
8. Karakteristik badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap pelaksana.
9. Karakteristik badan pelaksana juga dapat mempengaruhi kinerja kebijakan secara langsung.

1.7 Kerangka Penelitian



1.7.1 Program Keluarga Harapan (PKH)

Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut KEMSOS Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang tujuan untuk menangani kemiskinan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin melalui pemberian bantuan uang tunai dengan persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh peserta PKH, dan peserta PKH wajib berkomitmen untuk melaksanakan kewajibannya sebagai penerima PKH. PKH ditujukan kepada masyarakat miskin yang bertujuan secara umum untuk menurunkan dan memutus rantai kemiskinan, peningkatan kualitas SDM dan memberikan perubahan pola pikir kepada RTSM yang acuh terhadap kondisi peningkatan kesejahteraan sosial. Tujuan dari PKH tersebut juga sebagai bentuk upaya dalam mencapai tujuan pembangunan millennium (MDGs). PKH ditujukan kepada masyarakat miskin dengan memberikan bantuan uang tunai dengan kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta PKH, dan peserta PKH wajib berkomitmen untuk melaksanakan kewajibannya sebagai penerima PKH. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, dalam pasal 6 ketentuan yang dimaksud yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH berhak mendapatkan diantaranya pendampingan PKH, bantuan sosial PKH, pelayanan baik di pada aspek kesejahteraan sosial, fasilitas pendidikan juga kesehatan, serta program bantuan komplementer yang difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, subsidi energi, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Penerima bantuan PKH setiap komponennya

mendapatkan bantuan yang berbeda nominalnya. Berdasarkan data dari (kemensos.go.id) menjelaskan bahwa indeks dan faktor penimbang bantuan sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2021 (Rp)/Tahun yaitu :

Tabel 1.5 Kriteria Penerima Bantuan PKH

Kriteria Penerima Bantuan PKH	Besaran Bantuan
Ibu Hamil / Nifa	Rp. 3000.000
Anak Usia Dini 0 s.d 6 Tahun	Rp. 3000.000
Anak SD / Sederajat	Rp. 900.000
Anak SMP / Sederajat	Rp. 1.500.000
Anak SMA / Sederajat	Rp. 2.000.000
Penyandang Disabilitas	Rp. 2.400.000
Lanjut Usia	Rp. 2.400.000

Sumber : BPS Kota Semarang

1.8 Operasionalisasi Konsep

Sugiyono (2012:31) mendefinisikan definisi operasional sebagai mengidentifikasi konstruksi atau atribut yang diteliti dan mengubahnya menjadi variabel yang terukur. Dengan menjelaskan metode tertentu untuk melakukan penelitian dan berurusan dengan konstruksi, definisi operasional memungkinkan peneliti lain untuk meningkatkan metode pengukuran konstruksi yang ada atau untuk mengulangi pengukuran dengan cara yang sama. Dengan demikian, seorang operatif dapat didefinisikan sebagai definisi yang didasarkan pada karakteristik variabel tetap. Pertanyaan penelitian penting yang perlu dijelaskan dimasukkan dalam operasi. Operasi tersebut menggambarkan fitur dan masalah signifikan dari variabel studi dengan cara yang tepat, menyeluruh, dapat diandalkan, dan ditentukan. Peneliti akan melihat Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Bidang Pendidikan Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Semarang. Evaluasi ini

merupakan suatu kegiatan untuk menilai atau memeriksa program ataupun kebijakan terhadap dampak dari kebijakan publik maupun program terhadap sasarannya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dunn tentang evaluasi kebijakan, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan.

Tabel 1. 6 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala	Informan
A.Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Pendidikan Kota Semarang	A. Efektivitas	1.Ketepatan Tujuan Program 2.Strategi Pelaksanaan Program	1.Kepala Bidang PKH
	B. Efisiensi	Proporsi dana digunakan untuk kebutuhan pendidikan	1.Kepala Bidang PKH
	C. Kecukupan	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	1.Kepala Bidang PKH
	D. Perataan	Luasnya Jangkauan Program	1.Kepala Bidang PKH 2.Koordinator PKH
	E. Responsivitas	Responsivitas Masyarakat terhadap Program	1.Koordinator PKH 2.Pendamping PKH
	F. Ketepatan	Kesesuaian Sasaran Program	1.Koordinator PKH 2.Pendamping PKH
B.Menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat Program Keluarga Harapan (PKH) bidang Pendidikan	A. Standar dan sasaran kebijakan	program PKH tersebut sudah sesuai dengan target dan tujuan yang ingin dicapai atau belum.	1.Koordinator PKH

di Kota Semarang.	B. Sumberdaya	ketersediaan sumberdaya manusia dalam mendukung pelaksanaan PKH di bidang pendidikan.	1.Koordinator PKH 2.Pendamping PKH
	C. Hubungan antar organisasi	Melihat hubungan yang terjalin antar stakeholder dalam menjalankan Program Keluarga Harapan dan kegiatan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari program yang dijalankan	1.Kepala Bidang PKH 2.Koordinator PKH
	D. Karakteristik agen pelaksana	Peran para stakeholder dalam menjalankan suatu program maupun kebijakan	1.Koordinator PKH 2.Pendamping PKH
	E. Disposisi atau sikap para pelaksana	persepsi dari para pelaksana kebijakan, berkaitan dengan kinerja aktor – aktor yang terlibat	1.Masyarakat Penerima PKH 2.Pendamping PKH
	F. Keadaan sosial, ekonomi, dan politik	Bentuk partisipasi dari para pelaku kebijakan untuk mendukung pelaksanaan program dalam mencapai tujuannya	1.Masyarakat penerima PKH 2.Pendamping PKH

Sumber : Hasil Analisis Penulis

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Tujuan dari metodologi penelitian deskriptif kualitatif penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan meringkas berbagai situasi, kejadian, atau fenomena yang ada dalam realitas sosial masyarakat yang diteliti. Penelitian kualitatif, seperti yang ditekankan oleh Basrow dan Suwanda (2008:27), berfokus pada studi induktif data yang dikumpulkan di bidang tertentu dan berbeda untuk memberikan teori atau hipotesis yang dapat disebarluaskan secara luas. Wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah beberapa teknik yang digunakan untuk memperoleh data.

Tujuan penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk menjawab dan memperoleh solusi atas permasalahan penelitian yang berkaitan dengan fenomena sosial. Ciri-ciri penelitian kualitatif dapat dipahami dengan mengkaji definisi metode kualitatif dan deskriptif. Menurut Arikanto (2006:15), ciri-ciri atau ciri-ciri penelitian kualitatif antara lain:

1. Sifat Induktif,
2. Pertimbangan Situasi dan Reaksi Secara Holistik,
3. Memahami Perspektif Responden,
4. Penekanan pada Kemampuan Peneliti untuk Validitas,
5. Pentingnya Lingkungan Alam, dan
6. Pendekatan Berorientasi Proses.

Untuk menghindari pengukuran dan perbandingan variabel satu sama lain, informasi dari bidang ini dikumpulkan untuk penelitian ini menggunakan dokumen, catatan, dan catatan penelitian. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Pendidikan Kota Semarang merupakan satu-satunya variabel yang tercakup dalam penelitian ini.

1.9.2 Situs Penelitian

Dari sisi fokus penelitian, peneliti telah mempertimbangkan keterbatasan tertentu, seperti pemeriksaan peran dan tanggung jawab Warga Kota Semarang dan Dinas Sosial dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan. Peran ini meliputi pengumpulan data, perlindungan, dan layanan publik. Akibatnya, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai tujuan program di Semarang.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek atau informan dalam penelitian adalah orang-orang yang memberikan informasi. Oleh karena itu dalam memilih informan haruslah orang yang benar-benar tau atau orang yang melekat dengan permasalahan yang diteliti. Dalam memilih subjek penelitian didasarkan pada keterkaitan subjek dengan masalah yang diteliti. Dalam menetapkan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2017) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan teknik ini dilakukan oleh peneliti dalam mencari narasumber yang berdasar pada kriteria dan kualifikasi yang telah ditentukan

sebelumnya, yang berkenaan dengan masalah yang diteliti dan menghiraukan kriteria yang tidak dipenuhi oleh narasumber lainnya. Teknik purposive sampling merupakan teknik yang digunakan untuk memilih sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri yang sudah ditentukan sebelumnya berkenaan dengan obyek yang diteliti sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun informan dalam penelitian ini berasal dari masyarakat Kota Semarang penerima PKH, pendamping PKH Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang.

1.9.4 Jenis Data

Sugiyono (2015) membedakan dua kategori tipe data: kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggabungkan jenis data kualitatif dan kuantitatif.

1. Data Kualitatif Sugiyono (2015) mengartikan data kualitatif sebagai informasi yang disajikan dalam bentuk kata-kata, diagram, atau gambar. Dalam penelitian ini data kualitatif meliputi nama dan alamat subjek penelitian.
2. Data Kuantitatif Sugiyono (2015) mengkarakterisasi data kuantitatif sebagai informasi dalam bentuk numerik atau data kualitatif yang telah dirangkum.

Dari dua jenis data di atas dalam penelitian ini nantinya menggunakan data kualitatif.

1.9.5 Sumber Data

1. Data primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari sumber aslinya secara langsung. Hasil wawancara yang dilakukan dan observasi langsung di lokasi penelitian dijadikan oleh peneliti sebagai sumber data primer. Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan kepada narasumber mengenai Program keluarga harapan khususnya dalam bidang pendidikan di Kota Semarang sehingga dapat diketahui pelaksanaannya.

2. Data sekunder

Data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumber aslinya merupakan sumber data sekunder. Data pendukung dari data primer adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari berita-berita, artikel ilmiah, jurnal penelitian terdahulu, dokumen resmi PKH, peraturan-peraturan, dan dokumen resmi lainnya

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data yang diantaranya adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh peneliti untuk mengamati dan memahami obyek yang akan diteliti. Data yang didapat adalah berupa fakta mengenai

keadaan sebenarnya yang diperoleh dari proses observasi. Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mengamati evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Pendidikan Kota Semarang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui pertanyaan yang diajukan secara langsung maupun tidak langsung kepada informan untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan obyek permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data melalui wawancara ini, peneliti sebelumnya sudah mempersiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk kemudian diajukan kepada informan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada informan terkait dengan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Semarang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi sendiri merupakan teknik pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen. Dokumen dapat berupa gambar, karya dari orang lain juga tulisan. Dokumen ini adalah sebagai pelengkap dari penggunaan teknik pengumpulan data melalui observasi juga wawancara dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi ini bisa didapat oleh peneliti dari berbagai dokumen, surat, data dari manapun asalkan dokumen tersebut sesuai dengan topik

penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dokumen PKH dan data statistik terkait penerima pkh dan kemiskinan.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis melibatkan pemberian makna atau interpretasi terhadap data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data adalah proses sistematis untuk memeriksa dan mengekstraksi informasi secara menyeluruh dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain, sehingga hasilnya mudah dipahami dan dibagikan kepada orang lain. Sugiyono, mengutip Miles dan Huberman, mencatat bahwa aktivitas interaktif tetap ada hingga tugas selesai, sehingga menghasilkan data jenuh selama proses analisis dan kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Reduksi Data

Data-data yang ada yang didapatkan oleh peneliti kemudian dilakukan reduksi data dengan proses pemilihan, pemusatan, membuat ringkasan. Dengan reduksi data ini maka dapat mengarahkan dan memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti sehingga dengan begitu dapat dipilih data yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data terkait dengan evaluasi retrospektif Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang. Data-data yang telah direduksi dapat menunjukkan gambaran mengenai hasil dari observasi dan memudahkan peneliti dalam meneliti permasalahan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk penjelasan singkat, bagan, keterkaitan antar kategori, dan sebagainya. Penyajian data pada penelitian kualitatif yang biasa digunakan oleh peneliti yaitu berbentuk teks naratif. Penyajian data dapat memudahkan peneliti untuk memahami sesuatu yang terjadi dan melakukan perencanaan kerja yang hendak dilakukan selanjutnya sesuai dengan pemahaman tersebut. Penelitian ini dalam menyajikan data yaitu dengan mendeskripsikan terkait dengan evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan Kota Semarang dengan menggunakan teks naratif yang didukung dengan tabel ataupun grafik untuk menjelaskan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan intisari dari sebuah penelitian yang dilakukan yang digunakan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi bisa juga tidak, sebab dalam penelitian kualitatif rumusan masalahnya bersifat sementara dan akan berkembang menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai hasil temuan terbaru yang sebelumnya belum pernah ditemukan sebelumnya. Penelitian tentang kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) tekhusus dalam bidang pendidikan di Kota Semarang menggunakan analisis data yang dilakukan

dengan langkah pertama yaitu melakukan pengumpulan data lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, setelah data terkumpul peneliti melakukan reduksi data dengan membuat ringkasan dan memilih data yang diperlukan, kemudian hasil reduksi data tersebut dilakukan display atau disajikan dengan bentuk teks naratif, sehingga nantinya memudahkan peneliti dalam melakukan penarikan kesimpulan penelitian.

1.9.8 Kualitas Data

Dalam melangsungkan penelitian dengan tipe kualitatif harus sesuai dengan standar akan kredibilitas, yang dimana penyesuaian ini dilakukan guna penelitian yang dihasilkan memiliki tingkat kebenaran data dan kepercayaan yang tinggi yang dimana sesuai juga dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Triangulasi ialah langkah yang dapat ditempuh apabila hendak memeriksa nilai keabsahan sebuah data berdasarkan sumbernya, hal ini berarti perlunya sebuah upaya dalam melangsungkan pembandingan dan mengeceknya berulang kali sehingga memperoleh sebuah informasi yang dapat dipercaya keakuratannya.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Untuk mengevaluasi keandalan data, teknik triangulasi melibatkan perbandingan data dari sumber yang sama dengan menggunakan berbagai

metode. Misalnya, data yang dikumpulkan melalui wawancara selanjutnya dapat diverifikasi melalui observasi dan dokumentasi.

3. Triangulasi waktu

Kredibilitas juga dipengaruhi oleh waktu pengumpulan data. Wawancara yang dilakukan di pagi hari, ketika narasumber masih waspada dan belum menemui banyak tantangan, kemungkinan besar akan menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dan valid. Oleh karena itu, data dapat diverifikasi silang untuk kredibilitasnya melalui wawancara atau observasi yang dilakukan dalam berbagai kondisi.